

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pringsewu merupakan satu dari 15 kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625 km² kabupaten Pringsewu terdiri dari 126 Pekon dan 5 Kelurahan yang tersebar di 9 Kecamatan serta memiliki Perangkat Daerah sebanyak 48 termasuk Inspektorat. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah salah satunya mengawasi tentang keuangan desa melalui Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu inspektorat melakukan pengawasan keuangan desa.

Sistem pengawasan keuangan desa (SISWASKEUDES) yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dikelola inspektorat kabupaten pringsewu berupa layanan perangkat lunak untuk memantau desa-desa yang memang membutuhkan sorotan lebih tajam karena ada risiko-risiko yang tinggi. SISWASKEUDES merupakan aplikasi yang penting untuk melakukan pengawasan keuangan desa dengan baik. Aplikasi ini membantu menentukan risiko-risiko yang ada di desa baik aspek keuangan maupun non keuangan. Siswaskeudes diharapkan dapat dimanfaatkan oleh APIP untuk menentukan risiko-risiko tentang tata kelola keuangan desa dari mulai pendapatan sampai pertanggungjawabannya dan kedepannya dapat lebih baik dalam pengawasannya. Dengan siswaskeudes pelaksanaan pemeriksaan atas tata kelola keuangan desa dapat di dipersingkat.

Untuk menjamin efisiensi dan tercapainya kualitas layanan yang baik (good governance), diperlukan pengelolaan teknologi informasi (TI) yang tepat dan memenuhi persyaratan otoritas. Sebelum pengelolaan ini dilaksanakan, perlunya jadwal pelaksanaan sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki. Tetapi, saat ini masih terdapat perbedaan umum dalam penggunaan teknologi informasi, yaitu kurangnya petunjuk teknis penggunaan teknologi informasi yang efektif, masalah virus yang merusak dan menyebabkan hilangnya data, serta kegagalan sistem yang tidak terduga.

Dalam keadaan ini, penilaian tata kelola TI diperlukan, yang pada akhirnya dapat menghasilkan wawasan dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola TI pada Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Metode tersebut adalah kerangka kerja Cobit 2019 dan metode Balanced Scorecard, yang mengidentifikasi tujuan strategis sesuai perspektif pada Balanced Scorecard (BSC) yaitu keuangan, internal, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil analisis survei responden pengelola dan pengguna pada proses EDM03, EDM04, APO01, APO04, APO07, APO13, BAI05 dan DSS02 mendapatkan hasil rata-rata saat ini sejumlah 2,77 yang berarti hasil evaluasi kapabilitas Sistem Pengawasan Keuangan berada pada Level 3 / established.

1.2. Identifikasi Masalah

Tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang efektif memiliki implikasi yang besar terhadap struktur, operasi dan strategi organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi, produktivitas dan pengembangan daya saing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengelolaan terhadap aktivitas dan resiko yang tidak hanya meliputi masalah teknis atau operasional, tetapi juga eksekutif manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan birokrasi, seperti IT *governance*.

Sistem pengawasan keuangan desa (SISWASKEUDES) yang tidak terkelola dengan baik akan berdampak pada kerugian negara. Dengan demikian diperlukan

evaluasi tata kelola teknologi informasi pelaksanaan SISWASKEUDES yang sedang berjalan dan memastikan pelaksanaan mendukung tujuan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yaitu **‘Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Inspektorat Kabupaten Pringsewu Menggunakan *Framework Cobit 2019* Dan *Balanced Scorecard*’** Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sejauh mana tingkat kemampuan (*capability level*) serta tingkat kematangan (*maturity level*) tata kelola teknologi informasi yang sudah berjalan saat ini pada aplikasi siswaskeudes di inspektorat kabupaten pringsewu.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada batasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mengukur tingkat kemampuan (*Capability Level*) serta tingkat kematangan (*Maturity Level*) dari Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dengan *Framework Cobit 2019* pada domain EDM 03 *ensured risk optimization*, APO 12 *managed risk*, APO 13 *managed security*, APO 14 *managed data*, DSS 05 *managed security services* proses *balanced scorecard* menilai fondasi organisasi, membangun strategi bisnis, membuat tujuan organisasi, membuat strategic map bagi strategi bisnis organisasi, pengukuran kinerja, dan menyusun inisiatif.
2. Fokus dari penelitian ini yaitu pada Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) pada inspektorat kabupaten pringsewu.
3. Memperbaiki tata kelola sistem pengawasan keuangan desa (SISWASKEUDES) di inspektorat kabupaten pringsewu.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengukur tingkat kemampuan (*capability level*) serta tingkat kematangan (*maturity level*) tata kelola teknologi informasi yang sudah berjalan saat ini pada inspektorat kabupaten pringsewu.
2. Mengaudit sistem pengawasan keuangan desa (SISWASKEUDES) di inspektorat kabupaten pringsewu.
3. Membuat rekomendasi berkaitan dengan kendala yang dialami inspektorat kabupaten pringsewu dalam tata kelola teknologi pada sistem pengawasan keuangan desa.
4. Melakukan evaluasi aplikasi sistem pengawasan keuangan desa sehingga menghasilkan tata kelola yang baik.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penggunaan COBIT 2019 berdasarkan klasifikasinya yaitu diperoleh sistem tata kelola dan kerangka kerja tata kelola yang baik. Prinsip - prinsip pada kerangka kerja COBIT 2019 menunjukkan bahwa COBIT tidak ingin menjadi kerangka kerja kaku dan statis yang “memaksa” organisasi untuk mengikutinya apa adanya. Semangat keterbukaan, fleksibilitas dan adaptabilitas jelas dinyatakan secara eksplisit dalam prinsip - prinsip di atas. Selain itu prinsip keselarasan dengan standar - standar lain menunjukkan semangat untuk mempertahankan agar COBIT tetap dapat dijadikan sebagai payung besar yang menaungi penerapan berbagai standar teknis lain yang lebih spesifik.

Sementara dengan *balanced scorecard* perusahaan bisa merancang kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Model bisnis divisualisasikan dalam peta strategi yang membantu pimpinan untuk berpikir tentang hubungan sebab-akibat antara beberapa tujuan strategis yang berbeda